

NILAI BUDAYA SINTUWO MAROSO DALAM PEMBANGUNAN PERDAMAIAN PASCA KONFLIK POSO

Oleh:

Ratna Wulan

NIM. 8092001020

TESIS

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar

Magister Ilmu Hubungan Internasional

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



PROGRAM PASCASARJANA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS KATHOLIK PARAHYANGAN

BANDUNG

2024

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
PROGRAM STUDI MAGISTER HUBUNGAN INTERNASIONAL



Tanda Pengesahan Tesis

Nama : Ratna Wulan

Nomor Pokok : 8092001020

Judul : Nilai Budaya Sintuwo Maroso Dalam Pembangunan Perdamaian Pasca
Konflik Poso (*The Cultural Value of Sintuwo Maroso in Post-Conflict
Peacebuilding in Poso*)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Magister
Pada Senin, 19 Agustus 2024
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua Sidang merangkap anggota

Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si

Anggota

1. Dr. phil. Aknolt Kristian Pakpahan, MA.
2. Yulius Purwadi Hermawan, Drs., M.A., Ph.D.

Mengesahkan,

Kepala Program Studi Magister Hubungan Internasional

Dr. phil. Aknolt Kristian Pakpahan, MA.

Pernyataan Keaslian Tulisan

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ratna Wulan

NIM : 8092001020

Jurusan/Program Studi : Hubungan Internasional;

Judul : Nilai Budaya Sintuwo Maroso Dalam Pembangunan Perdamaian
Pasca Konflik Poso (*The Cultural Value of Sintuwo Maroso in
Post-Conflict Peacebuilding in Poso*)

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung,



Ratna Wulan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan nilai budaya Sintuwu Maroso sebagai instrumen resolusi konflik dalam konteks pembangunan perdamaian di Poso, Indonesia. Sintuwu Maroso, yang berasal dari filosofi lokal, mencerminkan prinsip saling memahami dan menghargai, serta saling memberi dan menerima dalam masyarakat Poso. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai metode utama, dengan analisis yang berfokus pada bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam upaya penyelesaian konflik berdasarkan pendekatan *Multitrack Peace Building Approach* yang dikemukakan oleh John Paul Lederach. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana prinsip Sintuwu Maroso dapat diterapkan secara efektif di berbagai level elite, menengah, dan akar rumput untuk menciptakan dasar perdamaian yang inklusif dan berkelanjutan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang penggunaan kearifan lokal dalam pembangunan perdamaian dan memberikan kontribusi pada pengembangan model resolusi konflik yang lebih holistik dan kontekstual.

Kata Kunci: Sintuwu Maroso, Resolusi Konflik, Pembangunan Perdamaian, Multitrack Peace Building Approach, Kearifan Lokal, Poso.

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of the Sintuwu Maroso cultural values as a conflict resolution instrument in the context of peacebuilding in Poso, Indonesia. Sintuwu Maroso, originating from local philosophy, embodies principles of mutual understanding and respect, as well as reciprocal giving and receiving within the Poso community. This research employs a qualitative approach with a case study methodology, focusing on how these values can be applied in conflict resolution efforts based on the Multitrack Peace Building Approach proposed by John Paul Lederach. The study explores how Sintuwu Maroso principles can be effectively implemented across various levels elite, intermediate, and grassroots to establish an inclusive and sustainable foundation for peace. The findings of this research are expected to provide insights into the use of local wisdom in peacebuilding and contribute to the development of a more holistic and contextual conflict resolution model.

Keywords: *Sintuwu Maroso, Conflict Resolution, Peacebuilding, Multitrack Peace Building Approach, Local Wisdom, Poso.*

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Lembar Pernyataan	ii
Abstrak	iii
<i>Abstract</i>	iv
Daftar Isi	v
BAB I – PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	11
1.4 Pertanyaan Penelitian	12
1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
1.6 <i>Literature Review</i>	14
1.6.1 Konflik Poso: Sejarah dan Upaya Penyelesaiannya	14
1.6.2 Resolusi Konflik dalam Perubahan Dunia	16
1.6.3 Manajemen Konflik dan Resolusi Konflik Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian	17
1.6.4 Memahami Studi Perdamaian sebagai Bagian dari Ilmu Hubungan Internasional	20
1.6.5 <i>The Context of Conflict Resolution – International Relations and The Study of Peace and Conflict</i>	22
1.6.6 Intervensi Kemanusiaan (<i>Humanitarian Intervention</i>) Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya dalam Konflik Bersenjata	23
1.7 Kajian Pustaka	25
1.7.1 Konflik	25

1.7.2	Pembangunan Perdamaian (<i>Peace Building Framework</i>)	31
1.7.3	Kerangka Pemikiran	34
1.8	Metodologi Penelitian	36
1.8.1	Metode Penelitian	36
1.8.2	Metode Pengumpulan Data	36
1.8.3	Teknik Analisis Data	37
1.9	Sistematika Penelitian	38
BAB II – KONFLIK POSO: AKAR DAN DAMPAK		40
2.1	Akar Konflik Poso	40
2.2	Dampak Konflik Poso	44
2.3	Konflik Poso ditinjau berdasarkan pendekatan Tranformasi Konflik John Paul Lederach	49
BAB III – NILAI BUDAYA <i>SINTUWU MAROSO</i>		51
3.1	Nilai Budaya <i>Sintuwu Maroso</i>	51
3.2	Pendekatan Kearifan Lokal dalam Nilai Budaya <i>Sintuwu Maroso</i>	55
BAB IV – NILAI <i>SINTUWU MAROSO</i> DALAM PEMBANGUNAN PERDAMAIAN DI POSO		61
4.1	Proses Pembangunan Perdamaian Pasca Konflik melalui Penerapan Kearifan Lokal <i>Sintuwu Maroso</i>	61
4.2	Revitalisasi Nilai <i>Sintuwu Maroso</i> Pasca Konflik	70
4.3	Penerapan Nilai Budaya <i>Sintuwu Maroso</i> sebagai upaya Pembangunan Perdamaian dianalisa dengan <i>Multitrack Peace Building Approach</i> John Paul Lederach	74
BAB V – PENUTUP		76
5.1	Kesimpulan	76
5.2	Saran	77
Daftar Pustaka		79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam lanskap global, konflik sosial dan politik merupakan fenomena yang terus menerus terjadi dan mengancam stabilitas serta keamanan dunia. Konflik-konflik ini sering kali dipicu oleh perbedaan etnis, agama, politik, atau ekonomi, yang memperuncing ketegangan antar kelompok masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik-konflik ini, mulai dari intervensi militer hingga diplomasi dan negosiasi. Namun, banyak dari upaya tersebut gagal mencapai perdamaian jangka panjang, karena tidak memperhitungkan faktor-faktor budaya dan sosial yang mendalam. Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk mengembangkan strategi resolusi konflik yang lebih holistik dan berkelanjutan, yang tidak hanya mengatasi gejala permukaan, tetapi juga akar penyebab dari konflik tersebut.

Umumnya, penyelesaian konflik melibatkan berbagai pendekatan, mulai dari diplomasi hingga intervensi militer. Diplomasi seringkali menjadi langkah pertama yang diambil dalam upaya menyelesaikan konflik, baik melalui negosiasi langsung antara pihak-pihak yang bertikai, mediasi oleh pihak ketiga, maupun melalui forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Negosiasi dan mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai yang dapat mengakhiri permusuhan dan menciptakan stabilitas jangka panjang. Diplomat dan negosiator berusaha mencari titik temu dan kompromi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat, seringkali dengan mengedepankan kepentingan bersama dan mengurangi perbedaan. Misalnya, Perjanjian Camp David antara Mesir dan Israel yang difasilitasi oleh Amerika Serikat pada tahun 1978, adalah contoh sukses dari

penggunaan diplomasi untuk mengakhiri konflik dan membuka jalan bagi perdamaian.¹

Namun disisi lain ketika diplomasi gagal mencapai hasil yang diinginkan atau ketika situasi konflik semakin memburuk, intervensi militer sering kali dipandang sebagai opsi terakhir. Intervensi militer dapat dilakukan oleh negara individu, koalisi negara, atau organisasi internasional seperti NATO. Tujuannya adalah untuk menghentikan kekerasan, melindungi warga sipil, dan memulihkan ketertiban. Sebagai contoh, intervensi NATO di Kosovo pada tahun 1999 dilakukan untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan mencegah pembersihan etnis.² Demikian pula, operasi militer yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan koalisinya di Irak pada tahun 2003 bertujuan untuk menggulingkan rezim Saddam Hussein yang dianggap sebagai ancaman bagi keamanan regional dan internasional. Meski demikian, intervensi militer sering kali kontroversial karena dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang kompleks, termasuk korban sipil, kerusakan infrastruktur, dan ketidakstabilan politik yang berkepanjangan.

Selain intervensi langsung, operasi penjaga perdamaian atau *peacekeeping missions* yang dijalankan oleh PBB juga menjadi salah satu bentuk penggunaan militer dalam penyelesaian konflik. Pasukan penjaga perdamaian bertugas untuk memantau gencatan senjata, melindungi warga sipil, dan mendukung implementasi perjanjian damai. Operasi penjaga perdamaian sering kali melibatkan berbagai negara yang mengirimkan pasukan dan sumber daya untuk mendukung misi ini. Contoh dari operasi ini adalah misi PBB di Sudan Selatan (UNMISS) yang bertujuan untuk melindungi warga sipil dan mendukung proses perdamaian di negara yang dilanda perang saudara. Namun, intervensi militer bukan tanpa risiko

¹ Tito Hilmawan Reditya, 2024, "17 September dalam Sejarah: Kesepakatan Camp David Diteken pada 1978," *Kompas*, diakses melalui <https://www.kompas.com/global/read/2021/09/17/150733770/17-september-dalam-sejarah-kesepakatan-camp-david-diteken-pada-1978>, pada 20 Juli 2024

² Volker Wagener, 2024, "Akhir Perang Kosovo dan Kontroversialnya Pengeboman NATP," *DW*, diakses melalui <https://www.dw.com/id/akhir-perang-kosovo-dan-kontroversialnya-pengeboman-nato/a-69319773>, pada 20 Juli 2024

dan kritik. Dalam banyak kasus, intervensi militer justru dapat memperburuk situasi dengan meningkatkan kekerasan dan memperpanjang konflik. Contohnya adalah intervensi militer di Libya pada tahun 2011 yang berhasil menggulingkan rezim Muammar Gaddafi tetapi kemudian meninggalkan kekosongan kekuasaan dan ketidakstabilan yang berkepanjangan. Selain itu, intervensi militer sering kali dituduh didorong oleh kepentingan politik atau ekonomi tertentu, yang dapat merusak legitimasi dan efektivitasnya sebagai solusi perdamaian.

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, merupakan tanah air bagi berbagai macam suku, ras, dan agama. Keberagaman ini, meskipun menjadi kekayaan budaya yang luar biasa, juga membuat Indonesia rentan terhadap konflik. Dengan lebih dari 300 kelompok etnis dan lebih dari 700 bahasa yang digunakan sehari-hari, perbedaan-perbedaan ini sering kali menjadi sumber ketegangan dan perselisihan.³ Konflik di Indonesia dapat timbul dari berbagai isu, termasuk perebutan sumber daya alam, ketidakadilan ekonomi, diskriminasi etnis dan agama, serta dinamika politik lokal dan nasional. Sejarah Indonesia telah mencatat berbagai konflik etnis dan agama, seperti yang terjadi di Maluku, Kalimantan, dan Poso, yang menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Selain itu, dinamika politik yang kompleks dan sering kali tidak stabil juga dapat memicu ketegangan antar kelompok.

Keberagaman kondisi masyarakat di Indonesia, yang mencakup lebih dari 300 kelompok etnis, ratusan bahasa, dan berbagai agama serta budaya, adalah kekayaan yang luar biasa dan unik. Kekayaan ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan budaya yang kaya, tradisi yang beragam, serta perspektif yang luas dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Namun, di sisi lain, keberagaman ini juga membawa potensi kerawanan yang signifikan bagi terjadinya konflik. Perbedaan etnis, agama, dan budaya dapat menjadi sumber ketegangan jika tidak dikelola dengan baik. Ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, diskriminasi, dan ketidaksetaraan sosial dapat memperuncing perbedaan ini dan memicu

³ Diakses melalui <https://www.kemlu.go.id/canberra/id/read/indonesia/2186/etc-menu>, pada 20 Juli 2024

ketidakpuasan yang berujung pada konflik. Selain itu, memori kolektif tentang konflik masa lalu dan persaingan politik serta ekonomi juga dapat menjadi faktor pemicu keretakan sosial. Oleh karena itu, sementara keberagaman Indonesia merupakan aset yang berharga, pengelolaan yang bijak dan inklusif sangat penting untuk memastikan bahwa keragaman ini menjadi sumber kekuatan, bukan kerawanan.

Penyelesaian konflik di Indonesia umumnya melibatkan berbagai pendekatan yang mencakup diplomasi, intervensi militer, penggunaan hukum, dan upaya rekonsiliasi sosial. Meskipun setiap konflik memiliki karakteristik dan konteks yang unik, pendekatan-pendekatan ini sering kali digunakan secara bersamaan untuk menciptakan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Pendekatan diplomasi dan negosiasi sering kali menjadi langkah awal dalam menyelesaikan konflik di Indonesia. Pemerintah dan pihak-pihak yang bertikai biasanya melakukan perundingan untuk mencapai kesepakatan damai. Perjanjian ini berhasil mengumpulkan berbagai kelompok yang bertikai untuk duduk bersama dan mencapai konsensus yang mengakhiri kekerasan. Diplomat lokal dan nasional serta pihak ketiga, seperti tokoh agama dan masyarakat, sering berperan penting dalam memediasi dialog ini.

Selain diplomasi, intervensi militer juga kadang-kadang diperlukan, terutama ketika situasi konflik sudah sangat parah dan melibatkan kekerasan bersenjata. Pemerintah Indonesia sering mengerahkan aparat keamanan, seperti TNI dan Polri, untuk menegakkan ketertiban dan keamanan. Misalnya, dalam konflik Aceh, pemerintah menggunakan operasi militer untuk meredam gerakan separatis GAM sebelum akhirnya mencapai perjanjian damai melalui proses negosiasi yang melibatkan pihak internasional, seperti Finlandia, yang memediasi Perjanjian Helsinki pada tahun 2005. Intervensi militer bertujuan untuk menghentikan kekerasan, melindungi warga sipil, dan memulihkan stabilitas, meskipun sering kali menimbulkan kontroversi dan kritik terkait pelanggaran hak asasi manusia. Penggunaan hukum dan peradilan juga merupakan metode penting dalam penyelesaian konflik di Indonesia. Penegakan hukum yang adil dan

transparan dapat membantu mengatasi akar permasalahan yang memicu konflik, seperti ketidakadilan, diskriminasi, dan pelanggaran hak. Pembentukan lembaga-lembaga seperti Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) bertujuan untuk mengawasi dan menegakkan hak asasi manusia, serta memberikan rekomendasi terkait penyelesaian konflik. Dalam beberapa kasus, seperti dalam penanganan konflik agraria, penyelesaian melalui jalur hukum dan mediasi oleh lembaga terkait dapat membantu meredakan ketegangan dan menemukan solusi yang adil bagi semua pihak.

Kecenderungan penyelesaian konflik yang menggunakan cara-cara konvensional dan kaku sering kali menjadi salah satu penyebab konflik tidak terselesaikan dengan efektif atau bahkan berkepanjangan. Pendekatan konvensional ini biasanya melibatkan penggunaan kekuatan militer, penegakan hukum yang keras, dan negosiasi formal tanpa mempertimbangkan dinamika sosial dan budaya yang kompleks dari pihak-pihak yang bertikai. Metode ini seringkali mengabaikan akar masalah yang sebenarnya, seperti ketidakadilan, diskriminasi, dan ketimpangan ekonomi, serta tidak memberikan ruang bagi dialog yang inklusif dan partisipatif. Selain itu, pendekatan yang kaku cenderung memperburuk ketidakpercayaan dan memperdalam luka sosial, karena pihak yang merasa ditekan atau dikalahkan akan menyimpan dendam dan rasa ketidakpuasan. Contohnya, dalam beberapa kasus di Indonesia, penggunaan kekuatan militer yang berlebihan untuk meredam konflik etnis atau separatis justru memperkuat resistensi dan memperpanjang siklus kekerasan. Tanpa pendekatan yang lebih fleksibel, kontekstual, dan berfokus pada rekonsiliasi serta pemulihan hubungan antar kelompok, upaya penyelesaian konflik cenderung gagal mencapai perdamaian jangka panjang dan hanya menghasilkan penyelesaian sementara yang rapuh.

Keberagaman budaya dan nilai-nilai kearifan lokal di Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar sebagai instrumen untuk menyelesaikan konflik, mengingat nilai-nilai tersebut dapat diterima secara luas oleh berbagai lapisan kepemimpinan, dari tingkat atas hingga akar rumput. Indonesia, dengan lebih dari 300 kelompok etnis dan ribuan tradisi serta adat istiadat, menawarkan kekayaan kultural yang

mendalam dan beragam. Nilai-nilai kearifan lokal, seperti gotong royong, musyawarah, dan toleransi, merupakan landasan bagi banyak masyarakat tradisional dan dapat memainkan peran penting dalam proses penyelesaian konflik.

Nilai-nilai budaya lokal sering kali mengandung prinsip-prinsip universal yang dapat menghubungkan berbagai kelompok dalam sebuah masyarakat yang heterogen. Misalnya, konsep gotong royong, yang menekankan kerjasama dan solidaritas, dapat diterima oleh semua tingkat kepemimpinan sebagai dasar untuk membangun kembali hubungan dan menyelesaikan perselisihan. Dalam konteks kepemimpinan tingkat atas, seperti pemerintah pusat dan pejabat tinggi, nilai-nilai ini bisa diintegrasikan dalam kebijakan publik dan strategi penyelesaian konflik yang mencerminkan aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat. Ketika pemimpin memahami dan menghargai nilai-nilai kearifan lokal, mereka dapat menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis pada konsensus.

Di tingkat menengah, seperti pemimpin daerah dan komunitas, nilai-nilai kearifan lokal dapat digunakan untuk memfasilitasi dialog dan mediasi antara kelompok yang bertikai. Pemimpin lokal sering kali lebih dekat dengan masyarakat dan lebih memahami dinamika serta masalah spesifik yang dihadapi oleh kelompok-kelompok tersebut. Dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya lokal, mereka dapat memfasilitasi pertemuan dan dialog yang lebih produktif, mengurangi ketegangan, dan mencari solusi yang sesuai dengan konteks lokal. Di tingkat akar rumput, nilai-nilai kearifan lokal berfungsi sebagai landasan dalam membangun kohesi sosial dan rekonsiliasi di tingkat komunitas. Masyarakat lokal sering kali memegang teguh nilai-nilai budaya mereka dalam kehidupan sehari-hari dan dapat menggunakan prinsip-prinsip ini untuk menyelesaikan perselisihan secara damai. Misalnya, dalam beberapa kasus konflik etnis di Indonesia, praktik adat seperti penyelesaian melalui pemuka adat dan upacara perdamaian telah terbukti efektif dalam meredakan ketegangan dan membangun kembali hubungan. Prinsip-prinsip ini menciptakan ruang bagi dialog dan saling pengertian yang lebih dalam, memperkuat jaringan sosial, dan mendorong sikap toleransi.

Dengan demikian, keberagaman budaya dan nilai-nilai kearifan lokal di Indonesia bukan hanya merupakan kekayaan yang harus dilestarikan, tetapi juga merupakan instrumen yang sangat berharga dalam penyelesaian konflik. Nilai-nilai budaya ini, dengan prinsip-prinsip universal seperti gotong royong, musyawarah, dan toleransi, dapat diterima dan diterapkan oleh semua tingkat kepemimpinan untuk menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan. Integrasi nilai-nilai ini dalam proses penyelesaian konflik memungkinkan pendekatan yang lebih kontekstual dan inklusif, yang pada akhirnya dapat mengarah pada perdamaian yang lebih stabil dan harmonis di seluruh Indonesia.

1.2 Identifikasi Masalah

Di tengah berbagai pendekatan global yang juga kerap diadaptasi sebagai penyelesaian untuk resolusi konflik di Indonesia, nilai-nilai budaya lokal muncul sebagai alternatif yang potensial dan efektif. Salah satu contoh yang menonjol adalah nilai budaya Sintuwu Maroso dari Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia. Sintuwu Maroso, yang secara harfiah berarti "bersatu dalam kekuatan", merupakan filosofi hidup yang mengedepankan kebersamaan, gotong royong, dan solidaritas sosial. Nilai ini telah menjadi landasan dalam kehidupan masyarakat Poso dan berfungsi sebagai instrumen untuk membangun kembali kohesi sosial setelah konflik. Poso telah menjadi salah satu daerah di Indonesia yang pernah mengalami konflik berdarah selama beberapa tahun. Konflik yang berakar pada perbedaan etnis dan agama ini menyebabkan kerusakan yang parah, baik secara fisik maupun sosial. Ribuan orang kehilangan nyawa, rumah-rumah hancur, dan kepercayaan antar kelompok masyarakat terpecah. Dalam konteks ini, upaya untuk membangun kembali perdamaian tidak hanya memerlukan pendekatan keamanan, tetapi juga pemulihan hubungan sosial dan kepercayaan.

Sintuwu Maroso memainkan peran krusial dalam proses resolusi konflik di Poso. Nilai ini mengajarkan pentingnya saling menghormati, bekerja sama, dan membangun kepercayaan antar individu dan kelompok. Melalui pendekatan berbasis komunitas ini, masyarakat Poso mulai mengadakan dialog antar kelompok,

memperkuat jaringan sosial, dan menciptakan ruang-ruang untuk kerjasama dalam berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, dan budaya. Sintuwu Maroso juga mendorong partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk perempuan dan pemuda, dalam proses pembangunan kembali. Pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai lokal seperti Sintuwu Maroso menunjukkan bahwa resolusi konflik tidak selalu harus datang dari intervensi eksternal. Sebaliknya, nilai-nilai dan praktik-praktik lokal dapat menjadi sumber daya yang sangat berharga dalam membangun perdamaian. Pengalaman Poso menunjukkan bahwa dengan menggali dan memanfaatkan nilai-nilai budaya lokal, masyarakat dapat menemukan jalan mereka sendiri menuju perdamaian yang berkelanjutan.

Penerapan nilai budaya Sintuwu Maroso dalam resolusi konflik di Poso memiliki relevansi yang signifikan terhadap proses penyelesaian konflik baik di tingkat nasional maupun global. Sintuwu Maroso, yang berarti "bersatu dan bersama" dalam bahasa lokal, merupakan nilai budaya yang menekankan pentingnya gotong royong, solidaritas, dan rekonsiliasi dalam mengatasi perbedaan dan konflik. Nilai-nilai ini, yang telah berhasil diterapkan untuk meredakan ketegangan dan membangun kembali hubungan di Poso, dapat menjadi model yang efektif dalam konteks penyelesaian konflik di berbagai tingkat. Penerapan nilai budaya seperti Sintuwu Maroso dapat dijadikan sebagai salah satu model resolusi konflik berbasis kearifan lokal yang relevan karena nilai-nilai tersebut menawarkan pendekatan yang holistik, inklusif, dan berakar pada prinsip-prinsip bersama yang dapat diterima oleh berbagai pihak. Sintuwu Maroso, yang berarti "bersatu dan bersama," menekankan pentingnya gotong royong, solidaritas, dan rekonsiliasi dalam mengatasi konflik, sehingga mencerminkan prinsip-prinsip universal yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks.

Nilai-nilai ini mendorong keterlibatan aktif dari seluruh anggota komunitas dalam proses penyelesaian, memperkuat rasa saling percaya dan pemahaman antara kelompok yang bertikai. Dengan melibatkan semua pihak dalam dialog terbuka dan mediasi yang berbasis pada kearifan lokal, Sintuwu Maroso menyediakan kerangka kerja yang tidak hanya mencari solusi atas perselisihan tetapi juga membangun

kembali hubungan sosial yang harmonis. Model ini relevan karena berfokus pada penyelesaian masalah secara bersama-sama dan memperhatikan konteks sosial serta budaya yang mendasari konflik. Selain itu, pendekatan ini dapat diadaptasi untuk menyelesaikan berbagai jenis konflik, baik di tingkat lokal maupun yang lebih luas, dengan tetap menghormati nilai-nilai dan tradisi setempat. Dengan demikian, Sintuwu Maroso menawarkan model resolusi konflik yang tidak hanya efektif dalam meredakan ketegangan tetapi juga membangun perdamaian yang berkelanjutan melalui penguatan kohesi sosial dan keadilan berbasis budaya.

Dalam tataran nasional, penerapan Sintuwu Maroso menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip lokal yang berakar dari kearifan budaya dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik dengan melibatkan seluruh komunitas dalam proses penyelesaian. Di Poso, Sintuwu Maroso telah digunakan sebagai dasar untuk mengadakan dialog antar kelompok yang bertikai, memfasilitasi proses mediasi, dan mencapai kesepakatan damai yang diterima oleh semua pihak. Pendekatan ini melibatkan pemuka adat, tokoh agama, dan masyarakat umum dalam mencari solusi yang menghormati hak dan kepentingan semua pihak. Keberhasilan model ini dalam konteks lokal menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya dapat digunakan secara efektif dalam skala nasional untuk menyelesaikan konflik yang melibatkan berbagai kelompok sosial dan etnis. Misalnya, penerapan prinsip-prinsip Sintuwu Maroso dalam konflik agraria atau masalah sosial lainnya di Indonesia dapat membantu menciptakan solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Di tingkat global, nilai Sintuwu Maroso memiliki relevansi yang luas karena prinsip-prinsipnya sejalan dengan pendekatan internasional untuk penyelesaian konflik yang mengutamakan inklusi dan rekonsiliasi. Konsep gotong royong dan solidaritas yang terkandung dalam Sintuwu Maroso mencerminkan prinsip-prinsip dasar dari Resolusi Konflik Berbasis Komunitas yang sering diterapkan di berbagai negara. Di banyak konflik internasional, pendekatan berbasis komunitas dan lokal sering kali menjadi kunci untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan. Pendekatan ini melibatkan berbagai pihak dalam proses mediasi dan rekonsiliasi, yang sangat penting dalam menyelesaikan konflik yang kompleks dan

berkepanjangan. Sintuwu Maroso, dengan penekanannya pada dialog dan kerjasama, menawarkan model bagaimana prinsip-prinsip budaya lokal dapat diterjemahkan ke dalam praktik penyelesaian konflik yang efektif di tingkat global.

Lebih lanjut, penerapan Sintuwu Maroso juga relevan dalam konteks upaya pembangunan perdamaian pasca-konflik di negara-negara yang mengalami konflik berkepanjangan. Prinsip rekonsiliasi dan rekonstruksi sosial yang terkandung dalam Sintuwu Maroso dapat diadaptasi untuk mengatasi ketegangan sosial dan membangun kembali kepercayaan di masyarakat yang terpecah. Di banyak konflik global, proses rekonsiliasi sering kali melibatkan pendekatan berbasis budaya yang menghormati identitas lokal dan tradisi. Sintuwu Maroso, dengan pendekatan yang menekankan pada partisipasi aktif dan keterlibatan komunitas, menawarkan kerangka kerja yang dapat diadaptasi untuk menciptakan solusi yang sensitif terhadap konteks lokal dan global.

Identifikasi masalah terhadap penerapan nilai budaya Sintuwu Maroso sebagai instrumen resolusi konflik, baik dalam konteks nasional maupun global, melibatkan beberapa tantangan signifikan. Pertama, keberagaman budaya dan konteks lokal di Indonesia membuat penerapan nilai-nilai seperti Sintuwu Maroso sulit diterapkan secara seragam di seluruh wilayah, karena nilai-nilai lokal lainnya juga memiliki relevansi dan kekuatan masing-masing. Perbedaan dalam norma, tradisi, dan struktur sosial antar daerah dapat menyebabkan kesulitan dalam menerapkan model ini secara konsisten. Di tingkat nasional, tantangan ini diperburuk oleh kompleksitas konflik yang melibatkan berbagai kelompok etnis dan kepentingan politik yang sering kali membutuhkan solusi yang lebih luas dan terintegrasi. Di tingkat global, tantangan tambahan muncul karena perbedaan besar dalam konteks sosial, budaya, dan politik antar negara. Sintuwu Maroso, yang berakar pada nilai-nilai lokal di Poso, mungkin tidak selalu relevan atau efektif dalam situasi konflik yang melibatkan konteks budaya dan sosial yang sangat berbeda. Model ini perlu diadaptasi untuk mengakomodasi perbedaan dalam dinamika konflik dan struktur sosial di berbagai negara. Selain itu, ada risiko bahwa penerapan nilai budaya lokal sebagai model resolusi konflik dapat dianggap sebagai

upaya eksklusif yang tidak mempertimbangkan perspektif global yang lebih luas atau kebutuhan untuk solusi yang lebih universal.

Dalam penerapannya, penting untuk mempertimbangkan bahwa kearifan lokal seperti Sintuwu Maroso harus diintegrasikan dengan pendekatan resolusi konflik yang lebih luas dan inklusif, yang menghargai keberagaman budaya dan memahami kompleksitas hubungan internasional. Penggunaan nilai-nilai budaya lokal sebagai model resolusi konflik harus disertai dengan pemahaman yang mendalam tentang konteks spesifik dan kebutuhan semua pihak yang terlibat, serta kemampuan untuk mengadaptasi dan menyeimbangkan prinsip-prinsip lokal dengan praktik dan kebijakan yang berlaku secara global.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah terhadap penerapan nilai budaya Sintuwu Maroso sebagai instrumen resolusi konflik melibatkan beberapa aspek penting untuk memastikan efektivitas dan relevansi model ini. Pertama, pembatasan masalah harus mencakup ruang lingkup geografis dan sosial di mana Sintuwu Maroso diterapkan. Karena nilai-nilai ini berasal dari Poso, penerapan model ini perlu mempertimbangkan keterbatasan dalam konteks lokal yang mungkin tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh Indonesia atau untuk konflik internasional. Hal ini termasuk perbedaan dalam norma budaya, struktur sosial, dan dinamika kekuasaan yang dapat mempengaruhi efektivitas penerapan Sintuwu Maroso. Selain itu, pembatasan masalah juga berkaitan dengan memperhitungkan tantangan adaptasi nilai budaya lokal dalam konteks konflik yang lebih luas dan kompleks. Sintuwu Maroso perlu diadaptasi dengan hati-hati untuk mengakomodasi perbedaan dalam konteks sosial, politik, dan budaya di luar Poso, terutama dalam situasi yang melibatkan kelompok dengan latar belakang budaya yang sangat berbeda. Model ini mungkin memerlukan modifikasi agar sesuai dengan berbagai skenario konflik dan untuk memenuhi kebutuhan spesifik pihak-pihak yang terlibat di tingkat nasional maupun global. Pada akhirnya pembatasan masalah ini juga

memperhatikan keterlibatan dan perspektif semua pihak yang terlibat dalam konflik. Sintuwu Maroso harus diintegrasikan dengan pendekatan yang memastikan inklusivitas dan keterlibatan berbagai kelompok, sehingga tidak hanya mengakomodasi nilai-nilai lokal tetapi juga memperhatikan hak, kebutuhan, dan aspirasi semua pihak yang terlibat. Ini termasuk pertimbangan mengenai bagaimana model ini dapat berfungsi dalam kerangka kerja resolusi konflik yang lebih luas, yang sering melibatkan berbagai aktor internasional dan organisasi.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Penerapan nilai budaya Sintuwu Maroso sebagai instrumen resolusi konflik menghadapi beberapa pembatasan yang signifikan, termasuk keterbatasan dalam generalisasi konteks lokal ke tingkat nasional dan global. Sintuwu Maroso, yang berakar pada kearifan lokal di Poso, memiliki kekuatan dalam konteks sosial dan budaya yang spesifik, namun tantangan muncul ketika mencoba menerapkannya dalam skala yang lebih luas atau dalam konflik yang melibatkan keragaman budaya yang lebih kompleks. Penyesuaian nilai-nilai ini untuk konteks yang berbeda memerlukan pemahaman mendalam tentang dinamika lokal dan cara integrasi prinsip-prinsip tersebut dengan pendekatan resolusi konflik yang lebih universal. Ini mencakup adaptasi terhadap perbedaan dalam norma budaya, struktur sosial, dan kepentingan politik di berbagai tingkat. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai lokal seperti Sintuwu Maroso dapat disesuaikan dan diimplementasikan dalam kerangka kerja resolusi konflik yang lebih luas, sambil memastikan inklusivitas dan relevansi dalam berbagai konteks.

Maka dari itu penelitian ini akan menguraikan jawab terhadap pertanyaan penelitian yaitu: ***“Bagaimana nilai budaya Sintuwu Maroso dapat diadaptasi dan diterapkan sebagai instrumen penyelesaian konflik?”***

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana nilai budaya Sintuwu Maroso, yang merupakan kearifan lokal dari Poso, dapat diadaptasi dan diterapkan dalam proses penyelesaian konflik di berbagai konteks, baik di tingkat nasional maupun global. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai penerapan nilai budaya sebagai instrumen yang dapat menyelesaikan konflik, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam integrasi nilai-nilai lokal dengan pendekatan resolusi konflik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana nilai-nilai budaya lokal dapat berkontribusi pada penyelesaian konflik yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta menawarkan rekomendasi untuk adaptasi model ini di berbagai skenario konflik di tingkat lokal, nasional, dan global.

1.5.2 Kegunaan Penelitian

a. Aspek Praktis. Penelitian ini memiliki kegunaan praktis yang signifikan dalam konteks penyelesaian konflik, baik di tingkat lokal maupun global. Dengan mengeksplorasi penerapan nilai budaya Sintuwu Maroso, penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi pembuat kebijakan, mediator, dan praktisi dalam merancang strategi penyelesaian konflik yang lebih inklusif dan efektif. Hasil penelitian ini dapat membantu memahami bagaimana prinsip-prinsip lokal seperti gotong royong dan solidaritas dapat diintegrasikan ke dalam kerangka kerja resolusi konflik yang lebih luas, sehingga meningkatkan kemungkinan mencapai kesepakatan damai yang diterima oleh berbagai pihak. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang cara menyesuaikan nilai-nilai budaya lokal untuk menangani konflik yang melibatkan keragaman budaya dan sosial, sehingga memungkinkan solusi yang lebih sensitif dan relevan dengan konteks spesifik.

b. Aspek Teoritis. penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teori transformasi konflik, seperti yang diajukan oleh John Paul Lederach. Lederach mengemukakan bahwa penyelesaian konflik yang efektif memerlukan pendekatan yang tidak hanya mengatasi gejala permukaan dari konflik, tetapi juga menyentuh akar penyebabnya dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat dalam proses rekonsiliasi.⁴ Penelitian ini, dengan fokus pada penerapan nilai budaya Sintuwu Maroso, menawarkan wawasan tentang bagaimana nilai-nilai lokal dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk memfasilitasi transformasi konflik secara mendalam. Sintuwu Maroso, dengan prinsip-prinsip gotong royong, solidaritas, dan rekonsiliasi, mencerminkan elemen-elemen kunci dalam pendekatan Lederach yang menekankan pentingnya melibatkan semua pihak dalam dialog dan penyelesaian masalah. Dengan meneliti bagaimana nilai-nilai ini dapat diterapkan dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini dapat memperluas pemahaman tentang bagaimana teori transformasi konflik dapat diadaptasi dan diterapkan dalam berbagai situasi konflik yang berbeda.

1.6 *Literature Review*

1.6.1 **Konflik Poso: Sejarah dan Upaya Penyelesaiannya**

Jurnal yang ditulis oleh Ilovia Aya Regita Widayat, Diana Mutiara Bahari, Azka Azzahra Salsabila, Nabila Rizky Sri Handayani, dan Hanna Khairunnisa Adjie ini menjelaskan mengenai sejarah terjadinya konflik sosial yang terjadi Kabupaten Poso yang di mulai tahun 1992, upaya penyelesaian dan keadaan pasca konflik. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan studi kasus yang menggunakan sumber-sumber bacaan, literature, journal, buku dan media cetak online yang berkaitan dengan penelitian ini. Tulisan ini menggunakan dua

⁴ Lederach, John Paul. *The Little Book of Conflict Transformation, Clear Articulation of The Guiding Principles by A Pioneer in The Field*. USA: Goodbooks. hlm 4-6

pendekatan yaitu teori konstruktivisme dan konflik social untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa faktor utama konflik sosial yang terjadi di poso bukan hanya karena dominansi agama, juga adanya perpindahan kekuasaan baik secara politik, ekonomi dan social. Dalam penyelesaiannya menemui berbagai kendala dan negosiasi sampai menemukan kesepakatan damai yang mewakili kepentingan kedua pihak. Secara umum konflik ini dilihat sebagai konflik yang mengatasnamakan agama yang mendominasi yaitu Islam dan Kristen. Konflik ini dilatar belakangi oleh tergesernya tatanan sosial yang mana masyarakat asli poso yang sebagian besar menganut kepercayaan Kristen yang merasa dimarjinalkan oleh kaum pendatang khususnya dari Jawa yang sebagian besar beragama Islam. Maka hal ini membuat system social berpindah dimana kaum pendatang lebih mendominasi dari segi politik, ekonomi dan sosial sehingga menimbulkan sentimen.

Perubahan yang terjadi secara tiba-tiba termasuk berakhirnya Perang Dingin dan merebaknya globalisasi memberi momentum tersendiri bagi peningkatan studi resolusi konflik. Satu alasannya bahwa tata dunia yang lahir berikutnya bukanlah yang mampu mengatasi segala ancaman ketidakstabilan akan tetapi justru sebuah kondisi yang sangat sarat dengan konflik internal maupun internasional. Momentum ini akhirnya menstimulasi pengembangan kerangka kerja konseptual dan teoritis dalam studi perdamaian dan resolusi konflik. Harus diakui bahwa banyak sekali kritik yang ditujukan pada metode-metode konvensional dalam penyelesaian konflik-konflik yang terjadi selama ini. Penekanan juga diberikan terutama pada para peneliti dan konsultan yang memberikan masukan kepada para pembuat keputusan yang nantinya akan menjadi garda terdepan dalam penyelesaian konflik, bahwa mereka dianggap masih sangat minim latar teori dan metodologi yang ilmiah.

Mungkin tantangan terbesar yang dihadapi studi resolusi konflik adalah bagaimana meningkatkan kapasitas studi konflik agar melahirkan formulasi resolusi yang diharapkan mampu mengakomodasi keberagaman konflik yang kini terjadi sebagai akibat dari gencarnya arus perubahan. Meskipun belum sampai pada

klaim satu keberhasilan, paling tidak sudah banyak usaha yang sudah dilakukan oleh para ilmuwan dalam mengembangkan kemampuan akademis agar konsep dan teori yang lahir mampu memberikan kontribusi yang efektif dalam menjawab dan memberikan jalan bagi penyelesaian konflik konflik yang kini terjadi. Beberapa hal bisa disebut sebagai kemajuan baru dalam studi resolusi konflik dalam menjawab tantangan konflik ke depan dapat dibagi menjadi dua hal: pertama, mengidentifikasi mengenai beragam sumber konflik dan kedua, resolusi konflik yang akomodatif terhadap kebutuhan komunitas.

Adapun kesamaan dari pada penggunaan jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pendekatan yang digunakan dalam menganalisa fenomena ini merupakan fenomena konstruktivisme dan konflik sosial. Terkait dengan penerapan teori konstruktivisme dalam penyelesaian Konflik Poso, penulis menyimpulkan bahwa konstruksi sosial atau yang menjadi dasar kedua belah pihak menyelesaikan pertikaian adalah adanya dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Jelas disebutkan dalam sila ke 2 bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ke 3 persatuan Indonesia, sila ke 4 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan sila ke 5 yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melihat dasar Pancasila tersebut, Konflik Poso merupakan suatu tindakan yang bersebrangan dengan Pancasila.

1.6.2 Resolusi Konflik dalam Perubahan Dunia

Jurnal yang ditulis oleh I Nyoman Sudira menjelaskan bahwa perubahan dunia yang dialami pasca Perang Dingin telah membawa dampak bagi perubahan yang melahirkan beragam bentuk dan pola konflik serta memberikan metode penyelesaiannya. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial umat manusia, maka konflik juga memiliki pola yang sarat dengan dinamika. Pola yang berkembang dari konflik-konflik tercatat dalam literatur bahwasanya hingga abad ke-17 konflik dalam hubungan sosial manusia didominasi oleh konflik antar ras, suku, negara kota, kemudian menjadi konflik/perang internasional. Selanjutnya,

setelah memasuki abad ke-19 sampai di penghujung abad ke-21 konflik yang terjadi mengambil tren baru menuju kepada apa yang dikenal sebagai konflik internal (dalam satu negara). Konflik dengan segala varian bentuk dan besarnya seperti penyerangan, peperangan dan kekerasan, memang menyertai hubungan sosial manusia baik dalam tatanan domestik maupun internasional. Pesatnya perubahan dunia membawa serta tantangan besar yang dihadapi studi resolusi konflik yakni bagaimana meningkatkan kapasitas studi resolusi konflik agar melahirkan formulasi resolusi yang diharapkan untuk mampu mengakomodasi keberagaman konflik yang kini terjadi sebagai akibat dari gencarnya arus perubahan. Meskipun belum sampai pada klaim satu keberhasilan, paling tidak sudah banyak usaha yang sudah dilakukan oleh para ilmuwan dalam mengembangkan kemampuan akademis agar konsep dan teori yang lahir mampu memberikan kontribusi yang efektif dalam menjawab dan memberikan jalan bagi penyelesaian konflik konflik di tengah dunia yang sarat perubahan ini.

Kesesuaian jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terkait dengan pembahasan mengenai mekanisme yang nantinya akan menunjukkan kita untuk mengambil langkah-langkah resolusi. Apa yang bisa diinformasikan disini adalah jika pada suatu saat kita dihadapkan pada konflik dengan kekerasan, maka langkah terbaik yang bisa dilakukan adalah dengan membuka wawasan kita terhadap konflik itu sendiri, agar kita bisa menempatkannya dalam porsi yang benar bahwa konflik merupakan bagian dari kehidupan kita dan kalau mendapatkan penanganan yang baik maka dia akan bisa mendapatkan resolusi yang memadai.

1.6.3 Manajemen Konflik dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian

Jurnal yang ditulis oleh Penny Kurnia Putri ini menjelaskan keterkaitan konflik dengan studi yang menarik dalam kajian ilmu hubungan internasional dalam beberapa tahun terakhir ini. Dalam situasi konflik, ada dua terminologi yang sering digunakan secara bersamaan dan bergantian, yaitu: manajemen konflik (*conflict management*) dan resolusi konflik (*conflict resolution*). Manajemen

konflik merupakan pendekatan yang tidak hanya berbicara tentang bagaimana menangani konflik, tetapi juga menunjukkan pengelolaan konflik dengan cara-cara kekerasan atau kompetitif dan non-kekerasan atau kooperatif. Sementara resolusi konflik dapat didefinisikan sebagai proses informal atau formal yang digunakan dua pihak atau lebih untuk menemukan solusi damai atas perselisihan mereka.

Namun pada akhirnya antara manajemen konflik maupun resolusi konflik saling melengkapi satu sama lain. Hal ini terjadi karena pendekatan manajemen konflik yang dilakukan dapat menjadi langkah awal dimulainya proses resolusi konflik. Penelitian ini bertujuan untuk mempertegas kembali batasan teoritis dan praktis dalam kajian manajemen dan resolusi konflik. Hal ini dilakukan agar para akademisi, aktivis, pengambil kebijakan, maupun masyarakat awam yang tertarik terhadap kajian keilmuan hubungan internasional dapat memetakan perilaku aksi dan reaksi aktor-aktor politik dan melakukan analisis konflik serta penanganan konflik secara tepat.

Adapun jurnal ini secara sistematis ditulis dalam beberapa bagian, sebagai berikut: *Pertama*, penulis memaparkan tinjauan literatur untuk meninjau penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan manajemen dan resolusi konflik. *Kedua*, penjelasan terkait metode yang digunakan dalam artikel ini, termasuk bagaimana data di kumpulkan. *Ketiga*, berkaitan dengan hasil dan diskusi yang di bagi dalam beberapa sub-bagian untuk melihat perbedaan sekaligus keterkaitan antara pendekatan manajemen konflik dan resolusi konflik. Terakhir, penulis merangkum beberapa hasil temuan dan menjawab tujuan penulisan pada bagian kesimpulan.

Jurnal ini menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Johan Galtung dalam memahami sebuah fenomena konflik, yaitu model pendekatan atas perdamaian yang digagas oleh Galtung (2007) dinamakan TRANSCEND. Pendekatan ini menawarkan model perdamaian melalui transformasi konflik secara damai. Artinya, dalam gagasan Galtung, transformasi konflik ini diartikan sebagai situasi konfliktual yang dapat diselesaikan tanpa menggunakan kekerasan, tetapi

mengubah skala konflik secara berkala, salah satunya melalui pelibatan pihak ketiga. Oleh karena itu, gagasan yang menaunginya berada dibawah kerangka studi perdamaian, dan bukan studi keamanan. Pendekatan TRANSCEND dapat diidentifikasi melalui tiga kategori tujuan, yakni *nature*, *culture*, dan *structure*. Aspek nature atau sifat alami diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di dalam diri kita dan sekitar kita. Sedangkan culture adalah hal-hal berupa norma dan nilai yang dianut oleh diri (internal). Terakhir, structure adalah sesuatu yang berada di sekitar kita (eksternal) dan telah terorganisasikan atas hal positif atau negatif, serta terkait konsekuensi (sanksi).

Kegunaan penggunaan jurnal terhadap penelitian yang akan penulis lakukan adalah bahwa jurnal ini membuka wawasan penulis untuk melihat batasan teoritis dan praktis dalam kajian manajemen dan resolusi konflik. Manajemen konflik dan resolusi konflik adalah dua pendekatan yang berbeda atas dasar tujuannya. Namun secara umum, keduanya saling bersinergi untuk mewujudkan perdamaian yang utuh. Manajemen konflik mengambil peran awal untuk menghadirkan perdamaian negatif, disusul dengan resolusi konflik yang berperan “menyempurnakan” upaya-upaya yang sudah dilakukan sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa batasan teoritis manajemen konflik terlihat pada penciptaan ruang bagi proses perdamaian seperti negosiasi. Sedangkan resolusi konflik terlihat pada perjanjian damai yang berhasil dibuat, dan aksi (*building*) setelahnya. Lebih lanjut, sebagai sebuah pendekatan, keberhasilan upaya manajemen dan resolusi konflik dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti timing, credible commitment, dan spoilers. Oleh sebab itu, manuver pihak ketiga dalam memainkan peran perdamaian harus disertai pertimbangan strategis yang berjenjang (jangka pendek/panjang). Meskipun belum sepenuhnya berubah, pergeseran upaya penyelesaian konflik sejauh ini sudah banyak menerapkan solusisolusi yang dititikberatkan pada tindakan nirkekerasan. Artinya sudah banyak yang menyadari bahwa upaya perdamaian tidak harus menunggu konflik pecah terlebih dahulu, sehingga menjadi peluang untuk upaya nirkekerasan lebih realistis dan implementatif.

1.6.4 Memahami Studi Perdamaian Sebagai Bagian dari Ilmu Hubungan Internasional

Jurnal yang ditulis oleh M. Prakoso Aji dan Jerry Indrawan menjelaskan bahwa studi perdamaian merupakan suatu disiplin ilmu yang diturunkan dari ilmu Hubungan Internasional. Dalam perkembangannya, ilmu Hubungan Internasional banyak berhadapan dengan kasus-kasus yang terkait dengan konflik dan peperangan antar-negara, maupun negara dengan non-negara. Untuk itulah, Studi Perdamaian lahir agar kajiannya dapat fokus membahas masalah-masalah seputar konflik, perang, serta upaya resolusinya. Studi Perdamaian pada umumnya diasosiasikan dengan konsep resolusi konflik. Salah satu metode resolusi konflik dalam Studi Perdamaian adalah konsep transformasi konflik. Transformasi konflik tidak hanya bertujuan untuk menghentikan konflik dan mengubah pola-pola hubungan negatif antar pihak-pihak yang berkonflik, tapi juga untuk mengubah struktur politik, sosial, dan ekonomi yang menyebabkan adanya pola-pola hubungan negatif tersebut. Studi Perdamaian menawarkan analisis baru tentang bagaimana seharusnya hubungan internasional melihat kompleksitas hubungan antar aktor-aktor.

Keterkaitan antara konsep resolusi konflik dengan Studi Ilmu Hubungan Internasional dapat dilihat dari teori-teori yang muncul dalam studi Hubungan Internasional berguna untuk membuka jalan menuju perdamaian. Saat salah satu tujuan ilmu Hubungan Internasional adalah untuk menghindari terjadinya perang dalam skala global, belajar dari terjadinya dua perang maha dahsyat di abad ke-20 lalu. Untuk itu, tujuan Studi Perdamaian harusnya juga demikian karena memang lahir dari rahim ilmu Hubungan Internasional. Dari beberapa teori Hubungan Internasional, realisme salah satunya, dipahami bahwa perdamaian dapat ditemui dalam *balance of power* antarnegara, ataupun dengan adanya suatu hegemoni. Sedangkan, bagi kaum kapitalis, perdamaian bisa diwujudkan dengan cara kerja sama dan pengumpulan kekayaan (*accumulation of wealth*). Paham lingkungan (*Green Thought*) menganggap bahwa dunia akan aman dan damai jika manusia tidak merusak alam. Kemudian, liberalisme melihat bahwa perdamaian ada dalam

institusionalisasi norma liberal dari ekonomi politik internasional yang berbasis pada kerja sama saling menguntungkan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Marxisme menghendaki tercapainya perdamaian dengan penghilangan kelas yang menjadi dasar dari penindasan melalui sebuah revolusi. Sementara itu, kelompok idealisme atau utopian memahami perdamaian sebagai keadaan ketika negara dan individu berada dalam kebebasan, kesejahteraan, dan tidak ada ancaman.

Pasca Perang Dingin usai, konflik didalam negara (intra-state) banyak bermunculan, terkadang berkembang menjadi masalah internasional (internationalized). Masalah lokal dengan cepat menjadi internasional. Semua terkait sumber daya, lingkungan, teknologi, informasi, dan komunikasi. Begitu juga dengan paradigma keamanan di abad 21 ini, terutama pasca 9/11, yang sangat didominasi Amerika Serikat, karena ditopang kekuatan militer yang kuat. Sistem internasional menjadi rapuh dan tidak aman. Untuk itu, Studi Perdamaian harus mampu menjawab tantangan ini dengan memberikan solusi alternatif terhadap paradigma keamanan yang berkembang sekarang, serta mengedepankan kajian-kajian, seperti *peacekeeping*, *peacemaking*, dan *peacebuilding* di atas, termasuk intervensi yang beretika, demiliterisasi, dan kontrol senjata global. Secara umum, menurut penulis studi ini harus mampu menjadi *global conflict prevention*.

Jurnal ini kembali menggunakan pendekatan Johan Galtung dalam memahami Resolusi Konflik, bahwa ada tiga tahap penyelesaian konflik yang nantinya digunakan oleh PBB dalam setiap kesempatannya menjadi mediator konflik, maupun pengerahan *peacekeeping operation* (UN PKO). Tiga tahap itu adalah:

- a. *Peacemaking* adalah proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrase terutama pada level elit atau pimpinan.
- b. *Peacekeeping* adalah proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral.

c. *Peacebuilding* adalah proses implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial, politik, dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang langgeng.

Namun disisi lain penulis jurnal ini juga melakukan elaborasi literatur dengan pendapat Imanuel Kant yang di abad ke-18 sebenarnya sudah bicara tentang perdamaian dalam bukunya "*Perpetual Peace*". Program perdamaian menurut Kant terdiri dari dua bagian. Pertama, kondisi awal saat sebuah negara republik belum memberikan kontribusi maksimal terhadap perdamaian internasional. Ini termasuk menghapus tentara yang siap perang, tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain, melarang *spionase* (mata-mata), serta melarang hasutan untuk berkhianat dan pembunuhan sebagai instrumen diplomasi, dan bisnis-bisnis negara. Menyebarkan konstitusi negara republik berarti menggeneralisasikan upaya-upaya untuk mencapai perdamaian, karena berjuang untuk damai adalah bagian dari prinsip dasar negara republik.

1.6.5 *The Context of Conflict Resolution – International Relations and The Study of Peace and Conflict*

Penelitian yang dilakukan oleh Ricardo Real P. Sousa menjelaskan mengenai fokus pemikiran Hubungan Internasional tentang perdamaian dan konflik, dimana hal tersebut dikaji dalam pendekatan Resolusi Konflik. Konseptualisasi klasik dari yang dipelajari dalam studi Hubungan Internasional di bidang keamanan telah berulang dipertanyakan oleh konseptualisasi baru yang memperluasnya ke aktor lain, ke sektor lain, dan sumber konflik lainnya yang bersifat internal. Jurnal ini menggunakan pendekatan *Copenhagen School* dan Konstruktivis yang dikemukakan oleh Barry Buzan, dimana Buzan merangkum dua perang dunia, proses dekolonisasi dan Perang Dingin sebagai periode sejarah, dimana ada kebangkitan multipolar struktur kekuasaan menggantikan bipolar Perang Dingin. Adanya multipolaritas ini menarik dominasi Eropa, Amerika Utara, Jepang, dan Australia disamping Amerika Serikat tetap menjadi negara Adidaya.

1.6.6 Intervensi Kemanusiaan (*Humanitarian Intervention*) Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya dalam Konflik Bersenjata

Jurnal yang ditulis oleh Emi Eliza, Heryandi, dan Ahmad Syofyan ini menjelaskan bahwa dalam mencegah atau menghentikan pelanggaran HAM dalam suatu fenomena konflik sosial yang terjadi di sebuah negara, maka kerap kali dibutuhkan suatu intervensi kemanusiaan, baik dengan atau tanpa persetujuan dari negara (*countries with internal conflict*). Jurnal ini mengangkat beberapa permasalahan penting, seperti bagaimana pengaturan hukum internasional tentang intervensi kemanusiaan, bagaimana peran PBB dalam intervensi kemanusiaan dalam konflik bersenjata. Keterkaitan penelitian ini dengan studi hubungan internasional adalah karena Negara dalam hubungan internasional dianggap sebagai suatu aktor yang sekaligus juga subjek hukum utama dalam hukum internasional. *Humanitarian intervention* atau Intervensi kemanusiaan secara umum adalah upaya untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dengan kekuatan-kekuatan tertentu (diplomasi dan militer) di suatu negara, baik dengan atau tanpa persetujuan negara itu (negara mengalami konflik internal). Ketika terjadi suatu masalah kemanusiaan di suatu negara yang bersifat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka masyarakat internasional dibenarkan untuk melakukan suatu tindakan intervensi.

Pengaturan tentang intervensi kemanusiaan belum diatur secara tegas dalam hukum internasional. Akan tetapi, menurut Piagam PBB Pasal 24 tentang tugas dan fungsi Dewan Keamanan PBB, maka PBB melalui Dewan Keamanan berhak menjalankan kewajibannya terkait adanya ancaman terhadap keamanan internasional, atau pelanggaran perdamaian dan keamanan, dan agresi sesuai dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip PBB dan dengan sebisa mungkin mengurangi penggunaan kekuatan bersenjata, hal ini sesuai dengan Pasal 26 Piagam PBB. PBB juga dalam menyelesaikan suatu konflik di dasarkan pada Bab VI Pasal 33 Piagam PBB. PBB memiliki mandat untuk melakukan semua upaya agar konflik dapat diselesaikan secara damai melalui cara-cara negoisasi, mediasi, arbitrase, penyelesaian hukum, serta cara damai lainnya. Selanjutnya Pasal 34

menyatakan bahwa PBB bisa melakukan investigasi setiap pertikaian (konflik) yang bisa membahayakan perdamaian internasional. Dewan Keamanan PBB dapat menyelidiki setiap pertikaian atau keadaan yang dapat menimbulkan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. PBB juga dalam menyelesaikan suatu konflik di dasarkan pada Bab VI Pasal 33 Piagam PBB. PBB memiliki mandat untuk melakukan semua upaya agar konflik dapat diselesaikan secara damai melalui cara-cara negoisasi, mediasi, arbitrase, penyelesaian hukum, serta cara damai lainnya. Selanjutnya Pasal 34 menyatakan bahwa PBB bisa melakukan investigasi setiap pertikaian (konflik) yang bisa membahayakan perdamaian internasional. Dewan Keamanan PBB dapat menyelidiki setiap pertikaian atau keadaan yang dapat menimbulkan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

Pada Pasal 36 Dewan keamanan dapat menganjurkan cara-cara penyelesaian yang dianggap sesuai dalam suatu pertikaian yang mengacu pada Pasal 33 atau suatu keadaan yang semacam itu. Selanjutnya Pasal 37 menerangkan bahwa apabila pihak-pihak yang tersangkut dalam pertikaian tersebut dianggap tidak dapat menyelesaikan masalahnya, maka Dewan Keamanan akan menetapkan apakah akan diambil tindakan menurut Pasal 36 atautkah mengambil cara-cara penyelesaian yang dianggap layak. Anjuran tentang cara-cara penyelesaian yang dianggap layak seperti yang tercantum dalam Bab VII Piagam PBB, Pasal 39 menyebutkan bahwa Dewan Keamanan akan menentukan ada tidaknya suatu ancaman terhadap perdamaian dunia dan akan menganjurkan atau memutuskan tindakan apa yang harus diambil sesuai dengan Pasal 41 Piagam PBB yaitu bahwa Dewan Keamanan dapat memutuskan tindakan apa yang dapat dilakukan di luar penggunaan kekuatan bersenjata, seperti pemutusan hubungan ekonomi, alat-alat komunikasi, serta pemutusan hubungan diplomatik. Dan Pasal 42 yang menyatakan bahwa jika langkah-langkah politik dan ekonomi (berdasarkan Pasal 41) tidak bisa atau cukup mendorong pihak-pihak yang bertikai maka penggunaan kekuatan militer (kekuatan darat, laut, dan udara) dapat dibenarkan untuk menjamin kestabilan keamanan dan perdamaian internasional. Tindakan militer hanyalah

langkah terakhir jika cara-cara lain tidak berhasil untuk melindungi penduduk dari pelanggaran HAM berat.

Keterkaitan jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah bahwa interdependensi antar negara yang semakin menguat telah membuat urusan dalam negeri suatu negara, dengan mudahnya terinternasionalisasi dan mendapatkan perhatian dari komunitas internasional. Hal ini termasuk didalamnya adalah jika negara tersebut mengalami konflik internal di wilayahnya, yang mengancam nilai-nilai HAM, serta cenderung berakibat pada pelanggaran HAM berat. Kondisi seperti ini tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena selain berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM, hal tersebut juga berdampak pada kondisi stabilitas politik dan ekonomi negara tersebut, yang tentu sedikit banyak akan membawa pengaruh pada konstelasi global. Maka dari itu prinsip intervensi kemanusiaan menjadi salah satu opsi yang dapat dipilih sebagai jalan resolusi konflik.

1.7 Kajian Pustaka

1.7.1 Konflik

Dalam bukunya yang berjudul *Conflict: Resolution and Prevention* (1990), John Burton menjelaskan bahwa konflik pada dasarnya bersumber dari kebutuhan dasar manusia (*basic human needs*). Burton berargumen bahwa konflik tidak hanya muncul dari perbedaan kepentingan atau tujuan yang bersaing, tetapi lebih mendalam lagi, berkaitan dengan kebutuhan mendasar yang tidak terpenuhi yang dimiliki oleh individu atau kelompok.⁵ Kebutuhan dasar ini mencakup kebutuhan akan identitas, keamanan, pengakuan, dan partisipasi yang merupakan bagian integral dari kesejahteraan manusia. Ketika kebutuhan-kebutuhan ini tidak terpenuhi, individu atau kelompok akan mengalami frustrasi dan ketidakpuasan yang dapat memicu konflik. Pendekatan Burton menekankan pentingnya

⁵ Burton, John. *Conflict: Resolution and Prevention*. New York: St. Martin's Press, 1990

mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan dasar ini sebagai kunci untuk menyelesaikan konflik secara efektif. Dengan memahami bahwa konflik sering kali merupakan manifestasi dari kebutuhan yang lebih dalam, strategi penyelesaian konflik harus dirancang untuk menangani dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, daripada hanya fokus pada penyelesaian masalah permukaan atau penyebab sementara. Pendekatan ini mendorong pemecahan masalah yang lebih holistik dan berkelanjutan, yang dapat mengurangi ketegangan dan menciptakan solusi yang lebih stabil dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam bukunya yang berjudul *Negara Gagal Mengelola Konflik*, Susan Nofri mendefinisikan konflik sebagai fenomena yang bersifat *omnipresent*, yakni sesuatu yang hadir di mana-mana dan merupakan bagian inheren dari interaksi sosial. Susan berargumen bahwa konflik adalah hal yang wajar dan biasa terjadi dalam masyarakat, bukan sebagai sesuatu yang luar biasa atau abnormal.⁶ Pandangannya menekankan bahwa konflik muncul dari ketegangan yang tak terhindarkan antara kelompok-kelompok dengan kepentingan, nilai, dan sumber daya yang berbeda. Dengan melihat konflik sebagai fenomena yang omnipresent, Woodward menyoroti bahwa konflik tidak hanya terjadi di wilayah atau situasi tertentu, tetapi bisa terjadi di berbagai tingkat, dari interaksi sehari-hari antara individu hingga pertikaian internasional yang besar. Konsekuensinya, manajemen dan resolusi konflik harus dipandang sebagai upaya berkelanjutan yang melibatkan pemahaman mendalam tentang dinamika sosial dan politik yang mendasari konflik, serta pengembangan strategi yang adaptif dan responsif terhadap kondisi yang berubah. Definisi ini mendorong kita untuk menganggap konflik sebagai bagian normal dari kehidupan sosial yang memerlukan pendekatan sistematis dan terencana untuk penanganannya, daripada mencoba menghindarinya atau menganggapnya sebagai kekurangan dalam sistem sosial atau politik.

Nirwaya *et. al.* menjelaskan bahwa konflik dapat dipahami sebagai hubungan dinamis antara dua pihak atau lebih, baik pada tataran individu maupun

⁶ Susan Nofri, *Negara Gagal Mengelola Konflik (Tata Kelola Konflik di Indonesia)*, Jakarta: KoPI, 2012, hlm. 4-5

kelompok, yang memiliki atau merasa memiliki kepentingan-kepentingan yang tidak sejalan. Dalam konteks ini, konflik muncul ketika masing-masing pihak memiliki tujuan, nilai, atau sumber daya yang berbeda, yang sering kali tidak dapat dipenuhi secara bersamaan. Ketika individu atau kelompok merasakan bahwa kepentingan mereka terancam atau tidak dapat direalisasikan karena perbedaan tersebut, ketegangan dan perselisihan cenderung berkembang.⁷ Konflik ini tidak selalu bersifat negatif; ia bisa menjadi pendorong perubahan dan perkembangan jika dikelola dengan baik. Namun, jika tidak ditangani secara efektif, konflik dapat memperburuk perpecahan dan memicu ketegangan lebih lanjut. Di tingkat individu, konflik sering kali melibatkan pertentangan pribadi, nilai, atau kebutuhan yang tidak cocok, sementara di tingkat kelompok, konflik dapat timbul dari perbedaan dalam tujuan, sumber daya, atau strategi. Memahami konflik sebagai hubungan yang melibatkan kepentingan yang tidak sejalan membantu kita untuk melihatnya sebagai bagian dari dinamika sosial yang memerlukan pendekatan penyelesaian yang konstruktif dan inklusif untuk mencapai kesepakatan dan pemecahan masalah yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Berikutnya, Malik pada buku berjudul *Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian* (2017), menguraikan lima asumsi dasar yang menjelaskan konflik.⁸ Asumsi pertama menjelaskan bahwa konflik adalah suatu elemen yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, hadir dalam setiap aspek interaksi sosial, baik di tingkat individu maupun kelompok. Konflik tidak bisa dihindari karena manusia memiliki kebutuhan, kepentingan, dan nilai yang beragam, yang sering kali saling bertentangan. Namun, meskipun konflik tidak dapat dielakkan, manusia memiliki kemampuan untuk mengelola konflik tersebut dengan cara yang konstruktif sehingga tidak berkembang menjadi kekerasan. Melalui pendekatan yang tepat seperti dialog, mediasi, dan negosiasi, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dapat menemukan solusi yang menghargai kepentingan semua pihak. Pengelolaan konflik yang efektif melibatkan pemahaman mendalam tentang penyebab konflik,

⁷ Narwaya, T.G. et. al. *Penanganan Konflik Bernuansa Keagamaan*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2013, hlm. 48

⁸ Malik, *Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2017, hlm. 11-13

keterampilan komunikasi yang baik, dan kemauan untuk mencapai kompromi. Dengan demikian, konflik dapat berfungsi sebagai katalis untuk perubahan positif dan peningkatan pemahaman antar individu atau kelompok, daripada menjadi sumber destruktif yang memicu kekerasan dan ketidakstabilan.

Asumsi kedua menyatakan bahwa konflik dapat dianalogikan seperti sebuah drama, di mana terdapat aktor, panggung (media yang digunakan), dan skenario. Dalam analogi ini, aktor adalah individu atau kelompok yang terlibat dalam konflik, masing-masing dengan peran, motivasi, dan tujuan mereka sendiri. Panggung adalah konteks atau arena di mana konflik terjadi, yang bisa berupa lingkungan fisik, sosial, atau politik, serta media komunikasi yang digunakan untuk mengekspresikan dan menyampaikan tuntutan serta keluhan. Skenario mencakup narasi atau alur yang menggambarkan bagaimana konflik berkembang, interaksi antara aktor, dan kemungkinan resolusi atau eskalasi. Seperti dalam sebuah drama, konflik memiliki struktur dan dinamika yang melibatkan peristiwa-peristiwa penting, keputusan kritis, dan momen-momen klimaks. Pemahaman tentang aktor, panggung, dan skenario ini memungkinkan kita untuk melihat konflik sebagai proses yang kompleks dan terarah, di mana perubahan peran, pengaturan panggung, dan modifikasi skenario dapat mempengaruhi hasil akhir. Dengan pendekatan ini, kita dapat menganalisis dan mengelola konflik dengan lebih baik, mencari cara untuk mengarahkan alur cerita ke arah yang lebih damai dan konstruktif, serta memastikan bahwa semua aktor memainkan peran mereka dalam menciptakan resolusi yang berkelanjutan.

Asumsi dasar ketiga menjelaskan bahwa konflik selalu memiliki dua sisi, yaitu potensi risiko dan potensi manfaat. Pada satu sisi, konflik dapat membawa risiko signifikan seperti ketegangan yang meningkat, kerusakan hubungan, ketidakstabilan sosial, dan bahkan kekerasan. Risiko ini muncul ketika konflik dibiarkan berkembang tanpa pengelolaan yang baik, atau ketika pihak-pihak yang terlibat mengambil tindakan yang merugikan satu sama lain. Namun, di sisi lain, konflik juga memiliki potensi manfaat yang tidak bisa diabaikan. Ketika dikelola dengan tepat, konflik dapat menjadi katalis untuk perubahan positif, inovasi, dan

perbaikan. Konflik dapat membuka ruang untuk dialog, memperjelas isu-isu yang mendasari, dan mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk mencari solusi yang lebih baik dan lebih adil. Konflik dapat memperkuat hubungan melalui pemahaman yang lebih baik dan kerja sama yang lebih erat setelah konflik diselesaikan. Oleh karena itu, memahami dan mengakui kedua sisi ini penting untuk mengembangkan strategi resolusi yang efektif, yang tidak hanya fokus pada menghindari atau mengurangi risiko, tetapi juga memaksimalkan manfaat yang dapat diperoleh dari konflik. Dengan demikian, konflik dapat diubah dari ancaman menjadi peluang untuk pertumbuhan dan perbaikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia.

Asumsi dasar ketiga menjelaskan bahwa konflik selalu memiliki dua sisi, yaitu potensi risiko dan potensi manfaat. Pada satu sisi, konflik dapat membawa risiko signifikan seperti ketegangan yang meningkat, kerusakan hubungan, ketidakstabilan sosial, dan bahkan kekerasan. Risiko ini muncul ketika konflik dibiarkan berkembang tanpa pengelolaan yang baik, atau ketika pihak-pihak yang terlibat mengambil tindakan yang merugikan satu sama lain. Namun, di sisi lain, konflik juga memiliki potensi manfaat yang tidak bisa diabaikan. Ketika dikelola dengan tepat, konflik dapat menjadi katalis untuk perubahan positif, inovasi, dan perbaikan. Konflik dapat membuka ruang untuk dialog, memperjelas isu-isu yang mendasari, dan mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk mencari solusi yang lebih baik dan lebih adil. Konflik dapat memperkuat hubungan melalui pemahaman yang lebih baik dan kerja sama yang lebih erat setelah konflik diselesaikan. Oleh karena itu, memahami dan mengakui kedua sisi ini penting untuk mengembangkan strategi resolusi yang efektif, yang tidak hanya fokus pada menghindari atau mengurangi risiko, tetapi juga memaksimalkan manfaat yang dapat diperoleh dari konflik. Dengan demikian, konflik dapat diubah dari ancaman menjadi peluang untuk pertumbuhan dan perbaikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia.

Asumsi dasar keempat menyatakan bahwa konflik dipengaruhi oleh faktor psikologis dan budaya. Faktor psikologis mencakup persepsi, emosi, dan sikap individu atau kelompok yang terlibat dalam konflik. Persepsi tentang ancaman, ketidakadilan, atau penolakan dapat memicu reaksi emosional yang intens, seperti

kemarahan atau ketakutan, yang memperburuk konflik. Selain itu, kebutuhan psikologis seperti pengakuan, penghormatan, dan rasa aman juga memainkan peran penting dalam dinamika konflik. Di sisi lain, faktor budaya mencakup nilai, norma, dan praktik yang berlaku dalam suatu kelompok atau masyarakat. Budaya memengaruhi cara individu atau kelompok memahami dan merespons konflik, termasuk strategi yang mereka anggap tepat untuk menyelesaikannya. Misalnya, dalam budaya yang menekankan harmoni dan kolektivitas, pendekatan resolusi konflik mungkin lebih berfokus pada mediasi dan konsensus, sementara dalam budaya yang menghargai individualitas dan kompetisi, pendekatan yang lebih langsung dan konfrontatif mungkin lebih umum. Pemahaman tentang bagaimana faktor psikologis dan budaya memengaruhi konflik memungkinkan pengelolaan yang lebih sensitif dan efektif, dengan menyesuaikan strategi resolusi konflik sesuai dengan konteks psikologis dan budaya pihak-pihak yang terlibat. Hal ini membantu menciptakan solusi yang lebih dapat diterima dan berkelanjutan, serta mengurangi risiko eskalasi konflik.

Asumsi dasar kelima menjelaskan bahwa konflik dapat dianalogikan sebagai kebakaran di hutan yang gundul, di mana setiap kejadian kebakaran tersebut melibatkan unsur-unsur rumput, pohon kering, api, dan angin. Dalam analogi ini, rumput dan pohon kering melambangkan kondisi dan faktor yang memicu atau memperburuk konflik, seperti ketidakadilan, ketegangan sosial, atau sumber daya yang terbatas. Api melambangkan konflik itu sendiri ketika kondisi yang mendukung ini bertemu dengan suatu percikan, seperti insiden tertentu atau tindakan provokatif, yang memicu terjadinya konflik. Angin melambangkan faktor eksternal yang dapat memperparah atau mempercepat penyebaran konflik, seperti pengaruh politik, ekonomi, atau media yang dapat memperuncing ketegangan. Dengan melihat konflik melalui analogi ini, kita dapat lebih memahami kompleksitas dan dinamika konflik, serta pentingnya pendekatan holistik yang mencakup pencegahan, pengelolaan, dan resolusi yang komprehensif untuk mencegah konflik dari berkembang menjadi situasi yang tidak terkendali.

Berdasarkan beberapa penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa konflik adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan sosial individu. Konflik muncul sebagai hasil alami dari interaksi manusia yang memiliki kebutuhan, kepentingan, dan nilai yang beragam, yang sering kali bertentangan satu sama lain. Asumsi-asumsi dasar yang telah dibahas menunjukkan bahwa konflik adalah fenomena omnipresent yang dipengaruhi oleh faktor psikologis dan budaya, serta memiliki potensi risiko dan manfaat. Konflik juga dapat dianalogikan sebagai drama dengan aktor, panggung, dan skenario, atau sebagai kebakaran hutan yang dipicu oleh kondisi rentan dan diperburuk oleh faktor eksternal. Mengingat sifat konflik yang inheren dalam dinamika sosial, penting bagi individu dan kelompok untuk mengembangkan keterampilan dan strategi dalam mengelola konflik secara konstruktif. Dengan pendekatan yang tepat, konflik tidak hanya dapat dikelola agar tidak menimbulkan kekerasan, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai katalis untuk perubahan positif dan peningkatan hubungan sosial.

1.7.2 Pembangunan Perdamaian (*Peace Building Framework*)

Berikutnya penulis akan menggambarkan strategi pembangunan perdamaian pada penelitian ini adalah dengan menggunakan kerangka pembangunan perdamaian (*peace building framework*) yang dikenal dengan sebutan *Nested Paradigm* yang dikembangkan oleh John Paul Lederach.⁹ Dalam paradigma ini digambarkan bahwa konflik perlu dilihat secara mendalam, utuh, dan menyeluruh, dimana terdapat tiga dimensi yang dijabarkan dalam paradigma ini, yaitu dimensi bagaimana konflik itu masih ada pada saat ini, kemudian dimensi dimana konflik ada pada masa lalu dan bagaimana mengkaji konflik tersebut pada masa depan. Pada dimensi masa kini, konflik dibahas berdasarkan isu (*issues*) yang berkembang di dalam masyarakat dan bagaimana isu tersebut berdampak secara sosial (*relationship*). Dampak dari isu tersebut tidak hanya mempengaruhi tatanan sosial melainkan juga berdampak pada subsistem (*sub system*) dan pada sistem (*system*) tertentu telah diatur. Untuk memahami bagaimana suatu isu berdampak

⁹ John Paul Lederach, "A Framework for Building Peace" dalam *Preparing for Peace Conflict Transformation Across Culture*, New York: Syracuse University Press, 1995, hlm. 11.

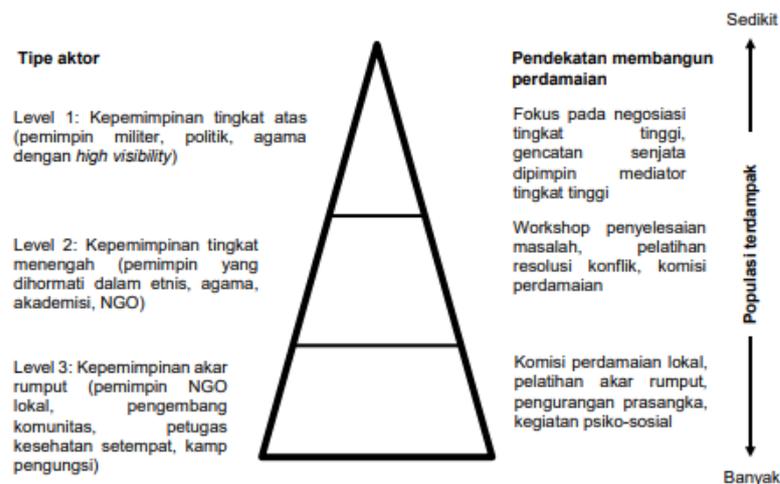
pada sistem sebuah Negara atau tatanan sosial, penggiat perdamaian perlu mengkajinya dalam garis waktu. Suatu isu tumbuh dan mengakar kuat dalam masyarakat terjadi karena tahapan proses yang kemudian dilihat berdasarkan garis waktu dalam kerangka pemikiran Lederach.

Multitrack Peace Building Approach merupakan sebuah model pembangunan perdamaian yang dikembangkan oleh John Paul Lederach dalam bukunya yang berjudul “*Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*”. Model ini menekankan pentingnya keterlibatan berbagai lapisan masyarakat dalam proses pembangunan perdamaian, dari tingkat akar rumput hingga tingkat elit. Lederach mengidentifikasi tiga level utama yang harus dilibatkan dalam pendekatan multitrack ini: tingkat tinggi (*high-level*), tingkat menengah (*middle-range*), dan tingkat akar rumput (*grassroots*).¹⁰ Tingkat tinggi melibatkan pemimpin politik dan militer yang memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan strategis, tingkat menengah melibatkan pemimpin komunitas, organisasi non-pemerintah, dan profesional yang dapat menjembatani komunikasi antara tingkat atas dan akar rumput, sementara tingkat akar rumput melibatkan masyarakat umum yang langsung terkena dampak konflik. Pendekatan ini menekankan bahwa perdamaian yang berkelanjutan hanya dapat dicapai jika semua tingkat ini bekerja secara sinergis, saling berkomunikasi, dan berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian. Dengan mengintegrasikan berbagai perspektif dan kepentingan dari seluruh lapisan masyarakat, *Multitrack Peace Building Approach* bertujuan untuk mengatasi akar penyebab konflik, membangun kepercayaan, dan menciptakan struktur sosial yang lebih adil dan stabil.

Multitrack Peace Building Approach oleh John Paul Lederach dikembangkan menjelang berakhirnya Perang Dingin pada akhir 1980-an hingga awal 1990-an, saat dunia menyaksikan pergeseran besar dalam dinamika politik global dan meningkatnya kebutuhan akan pendekatan baru dalam penyelesaian

¹⁰ John Paul Lederach, *Building Peace Sustainable Reconciliation in Divided Societies*, Washington: United State Institute of Peace Studie, 1997, hlm. 65.

konflik. Pada masa ini, banyak konflik etnis dan regional muncul ke permukaan setelah berakhirnya ketegangan bipolar antara blok Barat dan Timur. Dalam konteks ini, pendekatan tradisional yang berfokus pada diplomasi tingkat tinggi dan intervensi militer sering kali terbukti tidak memadai untuk menangani kompleksitas konflik internal yang mendalam. Lederach menyadari perlunya model yang lebih komprehensif dan inklusif, yang melibatkan semua lapisan masyarakat dalam proses pembangunan perdamaian. *Multitrack Peace Building Approach* mengintegrasikan aktor dari tingkat elit politik hingga komunitas akar rumput, dengan tujuan menciptakan rekonsiliasi yang berkelanjutan melalui partisipasi dan kolaborasi yang luas. Pendekatan ini juga mencerminkan pemahaman bahwa perdamaian yang langgeng tidak bisa dicapai hanya melalui kesepakatan formal antara pemimpin, tetapi juga memerlukan transformasi sosial yang mendalam yang melibatkan seluruh masyarakat. Dalam teori ini, Lederach menekankan pentingnya peran *middle-range* yang mempunyai potensi untuk dapat membangun infrastruktur dalam rangka mempertahankan proses pembangunan perdamaian secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Asumsi ini didasarkan pada pengaruh yang dimiliki oleh *middle-range* yang dapat menjangkau *high-level* atau *grassroots*.



Gambar 1.1 *Multitrack Peace Building*

Sumber: John Paul Lederach, 1997

Kerangka tersebut menggambarkan struktur tiga tingkat yang harus dilibatkan dalam proses pembangunan perdamaian untuk mencapai rekonsiliasi

yang berkelanjutan. Segitiga ini terdiri dari tiga lapisan utama: tingkat tinggi (*high-level*), tingkat menengah (*middle-range*), dan tingkat akar rumput (*grassroots*). Pada puncak segitiga adalah tingkat tinggi, yang melibatkan pemimpin politik, militer, dan tokoh berpengaruh lainnya yang memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan strategis dan menetapkan kebijakan. Tingkat menengah berada di bagian tengah segitiga, yang mencakup pemimpin masyarakat, organisasi non-pemerintah, profesional, dan akademisi yang berperan sebagai penghubung antara tingkat atas dan akar rumput, memfasilitasi komunikasi dan koordinasi. Bagian dasar segitiga adalah tingkat akar rumput, yang melibatkan masyarakat umum, kelompok lokal, dan individu yang langsung terkena dampak konflik dan memainkan peran penting dalam implementasi praktis dari upaya perdamaian di lapangan.

Lederach menekankan bahwa interaksi dan sinergi antara ketiga tingkat ini sangat penting untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Tingkat tinggi menyediakan kerangka kebijakan dan sumber daya, tingkat menengah menjembatani dan menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam tindakan yang dapat diimplementasikan, sementara tingkat akar rumput memastikan bahwa solusi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. Dengan mengintegrasikan berbagai perspektif dan keahlian dari semua lapisan masyarakat, kerangka segitiga ini memungkinkan pendekatan yang lebih holistik dan inklusif dalam menyelesaikan konflik dan membangun perdamaian yang tahan lama.

1.7.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dapat dikaitkan dengan *Multitrack Peace Building Approach* yang dikemukakan oleh John Paul Lederach untuk memahami bagaimana nilai budaya lokal dapat diterapkan dalam upaya resolusi konflik. Pendekatan Multitrack Lederach menekankan pentingnya melibatkan berbagai lapisan masyarakat dalam proses pembangunan perdamaian, termasuk tingkat tinggi, tingkat menengah, dan tingkat akar rumput. Dalam konteks penelitian ini, nilai budaya Sintuwu Maroso yang mengedepankan prinsip-prinsip harmoni, saling menghargai, dan rekonsiliasi dapat diintegrasikan ke dalam setiap lapisan kerangka *multitrack*.

Pada tingkat tinggi, nilai Sintuwu Maroso dapat mempengaruhi kebijakan dan keputusan strategis oleh pemimpin politik dan tokoh masyarakat, mendorong mereka untuk mempertimbangkan pendekatan yang lebih berfokus pada rekonsiliasi dan harmoni sosial. Di tingkat menengah, nilai-nilai ini dapat diterjemahkan oleh pemimpin komunitas, organisasi lokal, dan mediator yang berfungsi sebagai penghubung antara pihak-pihak yang berkonflik, serta membantu dalam merancang program-program yang mencerminkan prinsip Sintuwu Maroso. Sementara itu, pada tingkat akar rumput, nilai-nilai budaya ini berperan penting dalam membangun kepercayaan dan pemahaman di antara komunitas lokal yang terdampak konflik, serta dalam mendukung upaya rekonsiliasi dan pembangunan kembali hubungan sosial yang rusak.

Dengan demikian, kerangka pemikiran ini menunjukkan bahwa penerapan nilai budaya Sintuwu Maroso dapat memperkuat setiap lapisan dalam pendekatan multitrack, menciptakan sinergi antara kebijakan tinggi, strategi menengah, dan tindakan lokal untuk mencapai penyelesaian konflik yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan di Poso. Pendekatan ini menggarisbawahi pentingnya integrasi nilai-nilai lokal dalam strategi resolusi konflik global untuk menciptakan solusi yang lebih sesuai dengan konteks sosial dan budaya setempat. Berikut adalah visualisasi dari kerangka pemikiran tersebut:



Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan kualitatif. Dalam konteks penelitian ini maka pendekatan kualitatif sangat relevan karena mendorong peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami kompleksitas nilai budaya dan bagaimana nilai-nilai tersebut diimplementasikan dalam proses resolusi konflik. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana nilai Sintuwu Maroso dipahami, diterima, dan diterapkan oleh berbagai lapisan masyarakat, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penerapannya. Selain itu, metode ini memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa dan konteks lokal yang tidak selalu terlihat dalam data kuantitatif, sehingga memberikan pemahaman yang lebih holistik dan kontekstual mengenai dinamika konflik dan resolusi di Poso. Secara khusus penelitian ini akan menggunakan penelitian kualitatif dengan dengan pendekatan studi kasus adalah metode yang mendalam dan terfokus untuk mengeksplorasi fenomena kompleks dalam konteks nyata melalui analisis satu atau beberapa kasus spesifik.¹¹ Dalam pendekatan ini, peneliti menyelidiki kasus-kasus tertentu secara rinci untuk memahami dinamika, proses, dan faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena yang sedang diteliti. Dalam pendekatan ini, peneliti menyelidiki kasus-kasus tertentu secara rinci untuk memahami dinamika, proses, dan faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena yang sedang diteliti. Pendekatan ini memberikan wawasan yang kaya dan nuansa tentang bagaimana nilai-nilai budaya dapat diintegrasikan dalam praktik resolusi konflik, serta bagaimana hasil-hasil tersebut dapat diadaptasi dan diterapkan dalam konteks yang lebih luas.

1.8.2 Metode Pengumpulan Data

Guna mendukung penelitian ini, maka penulis menggunakan studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan data, dimana hal ini dilakukan dengan

¹¹ Moleong, Lexy J., *Metode penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007., hlm. 8

pengumpulan dan penelaahan berbagai jenis dokumen yang berkaitan dengan resolusi konflik, seperti laporan, kebijakan, arsip, dan publikasi lokal yang menggambarkan penerapan nilai budaya Sintuwu Maroso.¹² Melalui analisis dokumen, peneliti dapat mengidentifikasi pola, kebijakan, dan praktek yang relevan serta mengevaluasi bagaimana nilai-nilai budaya diterjemahkan ke dalam dokumen resmi dan komunikasi publik. Kemudian penulis juga menggunakan metode pengumpulan data berbasis studi kasus yaitu fokus pada kasus-kasus tertentu di Poso yang melibatkan nilai Sintuwu Maroso, peneliti dapat menganalisis bagaimana prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan dalam situasi nyata dan apa dampaknya terhadap resolusi konflik. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara rinci berbagai faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian konflik dan hasilnya dalam konteks lokal yang spesifik.

1.8.3 Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman dapat digunakan untuk memastikan proses analisis yang sistematis dan terstruktur. Teknik pertama adalah penyajian data (*data display*) yang melibatkan pengorganisasian dan penyajian data kualitatif dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti tabel, grafik, atau narasi. Penyajian data ini memungkinkan peneliti untuk melihat pola, tren, dan hubungan antara data yang dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumen, serta mempermudah pemahaman konteks penerapan nilai Sintuwu Maroso dalam konflik. Teknik kedua adalah reduksi data (*reduction data*) yang melibatkan proses penyaringan, pengkodean, dan pemilihan informasi penting dari data yang besar dan kompleks. Dalam penelitian ini, reduksi data membantu menyoroti aspek-aspek utama dari nilai Sintuwu Maroso yang relevan dengan resolusi konflik, mengeliminasi informasi yang kurang relevan, dan menyusun data dalam kategori-kategori yang signifikan. Ini membantu mengurangi data yang tidak perlu dan memfokuskan analisis pada elemen-elemen inti yang mendukung tujuan penelitian.

¹² Koentjaningrat, 1983, hlm. 420

Teknik ketiga adalah verifikasi data (*data verification*) yang bertujuan untuk memastikan keabsahan dan keandalan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Dalam penelitian ini, verifikasi data dapat dilakukan melalui triangulasi, yaitu membandingkan temuan dari berbagai sumber data (misalnya, wawancara dan dokumen) untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi. Verifikasi juga melibatkan cross-checking hasil analisis dengan teori atau literatur yang ada untuk menguatkan interpretasi data. Teknik terakhir adalah penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) dimana peneliti menarik kesimpulan berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. Dalam konteks penelitian ini, penarikan kesimpulan melibatkan interpretasi bagaimana nilai Sintuwu Maroso berkontribusi pada penyelesaian konflik dan rekonsiliasi di Poso. Kesimpulan ini didasarkan pada pola yang teridentifikasi, hasil verifikasi data, dan integrasi temuan dengan teori-teori yang relevan. Dengan menggunakan teknik-teknik ini, peneliti dapat memastikan bahwa hasil penelitian mencerminkan pemahaman yang mendalam dan valid mengenai penerapan nilai budaya dalam konteks resolusi konflik.

1.9 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan tesis ini disusun untuk memberikan struktur yang jelas dan logis dalam penyampaian penelitian sebagai berikut:

- a. BAB I Pendahuluan menyajikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan batasan serta manfaat penelitian. Bab ini menetapkan konteks penelitian dan menjelaskan pentingnya penelitian mengenai nilai budaya Sintuwu Maroso dalam upaya resolusi konflik.
- b. BAB II Konflik Poso: Akar dan Dampak yang mengulas secara mendalam mengenai latar belakang dan penyebab utama konflik di Poso, serta dampaknya terhadap masyarakat lokal. Bab ini menyajikan analisis komprehensif mengenai faktor-faktor yang memicu dan memperburuk konflik, serta konsekuensi sosial, politik, dan ekonomi yang ditimbulkan.

- c. BAB III Nilai Budaya Sintuwu Maroso yang fokus pada penjelasan nilai-nilai budaya Sintuwu Maroso, termasuk sejarah, prinsip-prinsip dasar, dan relevansinya dalam konteks masyarakat Poso. Bab ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana nilai-nilai tersebut tercermin dalam praktik sosial dan budaya, serta bagaimana nilai-nilai ini mendukung upaya rekonsiliasi.
- d. BAB IV Nilai Sintuwu Maroso dalam Pembangunan Perdamaian di Poso merupakan pembahasan yang mengeksplorasi bagaimana nilai Sintuwu Maroso diterapkan dalam upaya pembangunan perdamaian dan resolusi konflik di Poso. Bab ini menganalisis efektivitas nilai-nilai tersebut dalam memediasi dan menyelesaikan konflik, serta bagaimana nilai-nilai ini berperan dalam proses rekonsiliasi dan harmonisasi masyarakat.
- e. BAB V Penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian, menjelaskan temuan utama, serta memberikan rekomendasi untuk tindakan selanjutnya dan implikasi kebijakan. Bab ini juga mencakup refleksi mengenai keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian lebih lanjut.

Dengan sistematika ini, tesis diharapkan dapat menyajikan analisis yang terstruktur dan menyeluruh mengenai peran nilai budaya Sintuwu Maroso dalam penyelesaian konflik di Poso, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dan praktik resolusi konflik berbasis budaya.